

KENDALIKAN INFLASI JELANG PERAYAAN NATARU

Wabup Minta Stok Barang Kebutuhan Pokok Aman

SLEMAN (KR) - Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa meminta peran serta aktif para pelaku usaha untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan kebutuhan masyarakat serta memastikan ketersediaan barang menjelang sampai dengan setelah Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Ketersediaan barang kebutuhan pokok harus dipastikan aman.

“Kami berharap agar setiap perangkat daerah maupun anggota TPID Sleman dapat ikut melakukan pemantauan dan segera melaporkan jika terjadi gejala kelangkaan produk di pasar,” ujar Danang saat memandu High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel

Alana Yogyakarta, Rabu (4/12). High Level Meeting TPID ini dihadiri oleh seluruh anggota TPID Kabupaten Sleman dan stakeholder terkait.

Selain bersinergi dalam mengendalikan inflasi, Danang juga menilai momen pergantian tahun baru menjadi kesempatan

untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui sektor pariwisata. Momen ini harus dimanfaatkan oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata, untuk memberikan pelayanan yang baik dan melakukan promosi yang efektif bagi potensi wisata Sleman.

“High Level Meeting ini menjadi upaya untuk memantapkan kolaborasi dan sinergi dalam mengendalikan harga dan menjaga ketersediaan stok atau pasokan kebutuhan pokok di Kabupaten Sleman. Khususnya persiapan menyongsong perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2025. Melalui kesempatan ini



Wabup Sleman Danang Maharsa memberi arahan pada acara High Level Meeting TPID Sleman.

saya mengajak semua pihak untuk kembali menguatkan komitmen dalam upaya pengendalian inflasi,” tambah.

Sementara Kepala Bagian Perekonomian Setda Sleman Suyanto menuturkan, terkait persiapan Hari Raya Natal dan tahun baru, Pemkab Sleman telah mempersiapkan beberapa langkah dan upaya. Di antaranya peningkatan produktivitas pertanian untuk menjaga stabilisasi pasokan pangan, operasi pasar, pemetaan rantai distribusi, memastikan data kuota dan realisasi penyaluran BBM dan LPG bersubsidi, dan berbagai upaya lainnya. **(Has)-f**

PEMOHON HARUS DIDAMPINGI TENAGAAHLI
Pengajuan PBG Masih Hadapi Banyak Tantangan



Hery Kristiyanto (kanan) didampingi Toto Rahardjo memberi keterangan pers.

SLEMAN (KR) - Saat ini aturan terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) memang lebih rumit. Pemohon sebenarnya harus didampingi tenaga ahli yang saat ini tenaga ahli pun masih harus menjalani pelatihan dengan adanya kebaruan peraturan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Himpunan Ahli

Konstruksi Indonesia (HAKI) Komda DIY dan TPA Kota Yogyakarta Dr Ir Hery Kristiyanto kepada pers, Rabu (4/12) terkait akan digelarnya Workshop dan Short Course Penyusunan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Eastparc Hotel Sleman, 10-12 Desember mendatang. HAKI Komda DIY ingin mem-

bantu mewujudkan bangunan yang aman untuk masyarakat.

Menurutnya, saat ini masih banyak pengajuan PBG yang menghadapi tantangan cukup besar. Banyak yang kurang memahami aturan terbaru terkait PBG tersebut. “Kami terpanggil untuk memberikan solusi dengan workshop dan short course. Ini kepedulian kami membantu masyarakat pemohon, juga internal Tim Penilai Ahli (TPA) untuk membantu program pemerintah juga mewujudkan bangunan aman bagi masyarakat,” ungkap Hery.

Ditambahkan, dalam workshop nanti akan dibahas secara detail dengan narasumber yang berkompeten dan ahli di bidangnya. Saat ini peminat untuk workshop sangat luar

biasa dari berbagai daerah Indonesia ada, ada pemilik proyek, konsultan, dosen hingga mahasiswa. “Kami sangat senang karena bisa membantu lebih banyak masyarakat,” ujar Hery.

Ketua Pelaksana Kegiatan Ir Moch Arif Toto Rahardjo menambahkan, posisi Indonesia yang berada di *ring of fire* membawa konsekuensi banyaknya potensi bencana. Sehingga diharapkan dengan tersosialisasikannya aturan terbaru PBG, bisa membantu mewujudkan bangunan aman.

“Kita punya memori gempa Bantul 2006, ada juga saat ini isu Megathrust. Kita harus berupaya mewujudkan bangunan aman untuk masyarakat. Nah aturannya ada dalam PBG ini. Kami bantu urai persoalan dalam pengajuan,” ungkapnya. **(Has)-f**

BELAJAR PENGEMBANGAN PARIWISATA
Pimpinan DPRD dan Media Studi Tiru ke Lombok

SLEMAN (KR) - Pimpinan DPRD Kabupaten Sleman dan sejumlah media massa melakukan studi tiru ke Lombok. Kunjungan itu dalam rangka belajar pengembangan pariwisata di wilayah Lombok.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Ani Martanti ST mengatakan, media massa mempunyai peran strategis dalam menyampaikan program maupun kinerja dewan. Kegiatan kunjungan ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan jurnalis.

“Wartawan harus cerdas supaya beritanya berkualitas,” jelas Ani Martanti saat studi komparasi DPRD Kabupaten Sleman ke DPRD Kota Mataram dan DPRD Lombok Barat, Senin-Selasa (1-2/12). Kunjungan itu juga diikuti Wakil Ketua DPRD Hasto Karyantoro SIP. Selain itu mengajak sejumlah media cetak dan elektronik yang bertugas di DPRD Kabupaten Sleman.

Hasil studi komparasi ini akan diterapkan atau diadopsi dalam kebijakan di DPRD Kabupaten Sleman. Selain itu juga dapat meningkatkan sinergitas antara DPRD Kabupaten Sleman dengan media. “Media itu merupakan corong bagi DPRD Kabupaten Sleman. Harapannya kinerja Dewan dapat



Ani Martanti menyerahkan kenang-kenangan ke Ketua DPRD Kota Mataram.

dipublikasikan ke masyarakat. Makanya sinergi harus terus dijaga,” ujarnya.

Dalam kunjungan ke Lombok itu juga untuk belajar mengembangkan dunia pariwisata. Mengingat di Lombok banyak tempat wisata yang berkembang cukup baik. “Lombok ini juga merupakan daerah wisata. Kita bisa belajar tentang pengembangan pariwisata disini. Soalnya di Sleman masih banyak tempat wisata yang perlu dikembangkan,” tambah Hasto.

Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik SSos mengatakan, perkembangan pariwisata di Lombok ini cukup baik. Dimana wisata di Lombok mempertahankan budaya dan terus berinovasi di bidang wisata. “Inovasi itu

penting dalam pengembangan wisata. Supaya dunia pariwisata tidak stagnan,” katanya.

Sedangkan Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat Dr Syamsurinsyah MKes menuturkan, dalam mendukung sektor pariwisata, pemerintah daerah terus membangun infrastruktur pendukung pariwisata seperti akses jalan dan lainnya. Bahkan sekarang ini sedang menyusun raperda tentang pengelolaan kawasan tiga gili di Sekotong yakni Gili Nanggu, Gili Kedis, dan Gili Tangkong. “Ketiga Gili merupakan destinasi unggulan kami. Untuk mengembangkan kawasan tersebut, kami sedang merancang raperda tentang pengelolaan kawasan tiga gili di Sekotong,” terangnya. **(Sni)-f**

HASIL CUKAI TEMBAKAU NAIK TERUS
Danang Apresiasi Petani Tembakau Sleman

SLEMAN (KR) - Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menghadiri pengukuhan pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Cabang Sleman periode 2025-2030, di Puri Mataram Tridadi Sleman, Rabu (4/12). Danang mengapresiasi para petani tembakau yang telah berkontribusi memberikan pemasukan kepada negara melalui cukai tembakau. Sehingga hal tersebut bisa mendukung program dan pembangunan di Kabupaten Sleman, tak terkecuali

mendukung kesejahteraan petani tembakau.

“Di Kabupaten Sleman hasil cukai tembakau terus naik setiap tahunnya. Sekarang ada di kisaran Rp 2,3 miliar. Itu dibagi-bagi untuk kesehatan, sosialisasi undang-undang, BLT untuk petani tembakau, dan lainnya. Semoga ini nanti bisa terus bertambah,” ucapnya.

Danang juga mengucapkan selamat kepada pengurus baru yang telah dikukuhkan. Diharapkan APTI Cabang Sleman dapat men-

jalankan program-programnya dengan baik, sehingga membawa manfaat, baik bagi anggotanya ataupun bagi masyarakat secara umum.

Sementara Ketua APTI Cabang Sleman periode 2025-2030 Triyatno mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Sleman atas perhatian dan fasilitas yang telah diberikan kepada petani tembakau di Kabupaten Sleman. “Kami berharap hubungan baik ini bisa terus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan ke depannya,” ujarnya. **(Has)-f**



DPRD KABUPATEN SLEMAN

SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp.(0274)868413, Fax (0274)868413

KOMISI B DPRD KABUPATEN SLEMAN

Memberikan Akses Pelaku UMKM untuk Naik Kelas



Komisi B DPRD Kabupaten Sleman saat melakukan studi komparasi terkait digitalisasi UMKM.

SLEMAN (KR) - UMKM merupakan salah satu penyangga ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah perlu memberikan akses seluas-luasnya kepada pelaku UMKM agar dapat naik kelas. Dengan harapan kemajuan UMKM ini nanti dapat meningkatkan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat di

Kabupaten Sleman.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sleman Fika Chusnul Chotimah SH mengatakan, jumlah UMKM di Kabupaten Sleman cukup banyak. Keberadaan UMKM ini harus dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Sleman. “Keberadaan UMKM itu merupakan modal besar

untuk menggerakkan perekonomian kerakyatan. Tapi tergantung dari pemerintah daerah dalam memberdayakan pelaku UMKM ini,” kata Fika.

Untuk itu, Fika meminta kepada pemerintah daerah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pelaku UMKM. Diantaranya memberikan program-program pendam-

pingan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. “Akses untuk pelaku UMKM harus dibuka seluas-luasnya. Misalnya dengan pendampingan terhadap pelaku UMKM mulai dari kelas mikro sampai menengah,” terangnya.

Pendampingan itu bisa melalui memberikan pelatihan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. Seperti halnya yang dilakukan oleh Fika dalam pendampingan pelaku UMKM. Baik mulai cara produksi, packaging dan pemasaran. Ketiga aspek itu sangat dibutuhkan oleh pelaku supaya bisa bersaing dengan kompetitor lainnya.

“Bagaimana mendampingi pelaku UMKM memproduksi yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian cara pemasaran yang bagus untuk menarik calon konsumen. Terakhir, pemasaran juga cukup penting karena

menentukan jangkauan pasar yang akan dituju,” ucap politisi dari PPP ini.

Dalam pendampingan itu, Fika juga memberikan advokasi terhadap pelaku UMKM untuk mengurus izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal. Kedua izin itu sangat diperlukan bagi pelaku UMKM olahan pangan sebagai garansi bahwa olah pangan sudah terjaga ke higienisan dan kehalalannya. “Apalagi kalau produk olahan pangan mau masuk ke supermarket atau toko jejaring. Syaratnya memiliki izin PIRT dan sertifikasi halal. Makanya saya memfasilitasi pelaku UMKM untuk membuat izin PIRT dan sertifikasi halal,” ujar warga Gamol Balecatur Gamping ini.

Di samping itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi pelaku UMKM untuk memamerkan pro-

duknya di pameran atau bandara. Termasuk nanti juga perlu menyediakan ruang pamer di rest area tol yang ada di wilayah Sleman. Tujuannya produk UMKM Sleman lebih dikenal masyarakat secara luas.

“Pintu-pintu masuk Sleman perlu pameran produk UMKM baik olahan makanan maupun non olahan makanan. Misalnya di bandara atau nanti di rest area tol. Supaya orang yang datang di Sleman mengetahui produk unggulan Sleman,” terang anggota legislatif dari Dapil Gamping-Mlati ini.

Pendampingan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM. Dengan masifnya pendampingan, diharapkan semakin banyak UMKM yang naik kelas. Jika semakin banyak UMKM



Fika Chusnul Chotimah SH

naik kelas dapat meningkatkan perekonomian wilayah dan kesejahteraan masyarakat. “Semakin banyak UMKM naik kelas, akan semakin bagus. Ketika sudah banyak yang naik kelas, harapannya juga lahir UMKM baru. Sehingga nanti perekonomian masyarakat akan lebih bagus,” tuturnya. **(Sni)-d**